



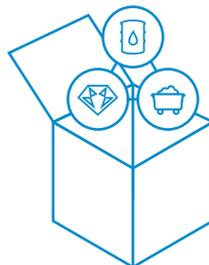
Republic of Indonesia

EITI

**Konferensi Pengungkapan
Identitas Kepemilikan**
Penerapan Bersama,
Penegakan Sistem

P R O G R A M
K O N F E R E N S I

Hotel Fairmont Jakarta, Indonesia
23-24 Oktober 2017



Konferensi Pengungkapan Identitas Kepemilikan

Penerapan Bersama,
Penegakan Sistem

Fairmont Hotel, Jakarta, Indonésie
23-24 Oktober 2017

Registrasi:

Partisipan yang telah mendaftar dapat mengambil tanda pengenal di resepsionis Hotel Fairmont Jakarta pada hari Minggu, 22 Oktober pukul 14:00-19:00 WIB, Senin, 23 Oktober pukul 06:30-19:00 WIB, dan Selasa, 24 Oktober pukul 08:30-15:30 WIB.

Penerjemahan:

Semua sesi pleno akan diterjemahkan secara serentak dalam bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan bahasa Indonesia.

Internet:

Tersedia koneksi internet wireless.

Media sosial:

Sebelum dan selama konferensi berlangsung, Anda dapat mengikuti jalannya konferensi dan perbincangan terkait lewat aplikasi atau kanal media sosial kami, dengan tagar #OPENUP.

Alamat:

Hotel Fairmont Jakarta
Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno
Jakarta, Indonesia, 10270

Sambutan Ketua Dewan

Selamat datang di Konferensi Pengungkapan Identitas Kepemilikan di Jakarta.

Konferensi ini merupakan sebuah tonggak sejarah dalam perang global melawan korupsi. Ketika skandal Panama Papers terkuak pada Maret 2016, dunia seakan terbangun dalam menyadari pentingnya membuat perubahan berarti atas isu transparansi kepemilikan. Laporan tersebut mengekspos penggunaan perusahaan tempurung (*shell company*) anonim untuk menyembunyikan atau sarana pencucian uang.

Tantangan terbesar adalah mengubah reaksi kemarahan ini menjadi sebuah aksi, mulai dari kampanye hingga penegakan sistem pemerintah.

Di Indonesia, kami melihat sendiri ramainya debat publik, dengan EITI dan para *stakeholder* mendiskusikan tentang bagaimana transparansi kepemilikan dapat memperbaiki pengumpulan pajak di sektor ekstraktif dan meminta para pemilik perusahaan untuk mempertimbangkannya. Karena itu sangat tepat bagi pemerintah Indonesia dan EITI menyelenggarakan konferensi ini di Jakarta.

Penerapan bersama, penegakan sistem

Saya bangga dengan kepemimpinan 52 negara pelaksana EITI terkait transparansi *beneficial ownership*. Pemahaman mendalam dari uji coba pengungkapan *beneficial ownership* EITI berhasil meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi tantangan bersama dan menemukan solusi awal. Sejak saya menjabat sebagai Ketua Dewan pada Februari 2016, pemahaman kami telah meningkat secara pesat yang puncaknya adalah penyelenggaraan Konferensi Pengungkapan Identitas Kepemilikan ini. Kami telah mengumpulkan para ahli dan praktisi terkemuka dunia untuk berbagi mengenai praktik pembangunan sistem yang kuat dan berkelanjutan untuk pengungkapan *beneficial ownership*. Dan dengan melakukan ini, kami mengirim pesan kepada dunia bahwa transparansi tak lagi sekadar aspirasi, namun sebuah ekspektasi.

Mempertahankan momentum

Konferensi ini adalah sebuah kesempatan bagi negara-negara untuk kembali berkomitmen terhadap transparansi *beneficial ownership* serta penghapusan kepemilikan tertutup di sektor ekstraktif. Saya berharap semua negara mengimplementasikan esensi penting konferensi ini untuk memperbarui komitmen terhadap pengungkapan *beneficial ownership* berdasarkan pengalaman dan ambisi yang lebih besar.

Tak ada satu tindakan atau sarana yang dapat mengatasi semua tantangan dari operasi anonim dan penghindaran pajak. Norma-norma internasional baru tak dapat diterapkan dalam semalam, namun konferensi ini merupakan tonggak penting menuju perbaikan sistem melawan korupsi dan tata pemerintahan buruk.



Fredrik Reinfeldt

Ketua Dewan EITI

Sambutan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Selamat datang di Indonesia!

Sebagai tuan rumah bersama Konferensi Pengungkapan Identitas Kepemilikan, dan atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada para partisipan yang hadir. Bagi Indonesia, konferensi ini merupakan wujud komitmen dalam membangun berbagai konvensi internasional dari G-20; dari pertukaran informasi keuangan secara otomatis lintas negara (AEOI); juga sebagai bagian dari EITI serta komitmen terhadap KTT Anti Korupsi di London tahun 2016.

Dengan dihadiri 52 negara dari seluruh dunia, kita semua berkumpul dan saling berbagi pengalaman dan pelaksanaan dalam menerapkan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengendali utama perusahaan, atau yang lebih dikenal sebagai beneficial ownership, yang saya yakin tak hanya akan membawa manfaat bagi pemerintah Indonesia, namun bagi semua negara yang telah menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam hal implementasi beneficial ownership.

Dengan menerapkan transparansi beneficial ownership, saya percaya bahwa tingkat kepercayaan di bidang investasi dan penerimaan negara di Indonesia pada khususnya, dan di negara-negara lain secara umum, akan meningkat.

Atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder untuk segala usahanya dalam menyukseskan pelaksanaan acara ini.

Akhir kata, semoga kunjungan Anda produktif dan menyenangkan, dan jika waktunya tiba Anda akan meninggalkan konferensi ini dengan wawasan baru dan antusiasme menggebu. Saya juga berharap Anda berkesempatan untuk merasakan budaya Indonesia yang melegenda, juga berbagai kuliner yang lezatannya diakui dunia.

Bambang Brodjonegoro

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Indonesia

Ruangan

Ground level

- Ball room

Level 3

- Diamond
- Emerald
- Opal
- Ruby
- Sapphire

Pameran Beneficial Ownership

Area serambi ruang pertemuan

Berbagai stan yang menampilkan hasil nyata upaya EITI bersama para stakeholders Indonesia untuk memajukan transparansi beneficial ownership.

Lokakarya

PLENO 1: Mengakhiri anonimitas perusahaan – kunci penting dalam memerangi korupsi

LOKAKARYA 1: Kepemilikan tersembunyi dan arus keuangan terlarang

LOKAKARYA 2: Mengetahui perusahaan yang diberikan lisensi minyak, gas, dan pertambangan

LOKAKARYA 3: Mencari tahu dengan siapa Anda berbisnis – memperbaiki iklim investasi lewat transparansi kepemilikan

LOKAKARYA 4: Mengidentifikasi risiko korupsi di tingkat eksekusi pengadaan (hilir) dan rantai pasokan

LOKAKARYA 5: Standar dan komitmen beneficial ownership yang berkembang: Satuan Tugas Aksi Finansial (FATF), Forum Global Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Uni Eropa

LOKAKARYA 6: Struktur perusahaan yang kompleks dan pokok permasalahan yang menjadi pertimbangan dalam pengungkapan beneficial ownership

LOKAKARYA 7: Bagaimana mendefinisikan pihak-pihak yang memiliki kewenangan publik (politically exposed person) serta keterkaitannya dengan deklarasi aset

LOKAKARYA 8: Bagaimana kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat terjalin dalam upaya meningkatkan pengungkapan beneficial ownership

LOKAKARYA 9: Langkah-langkah membangun kerangka hukum dan peraturan untuk kepentingan transparansi beneficial ownership

LOKAKARYA 10: Bagaimana cara membuat pencatatan beneficial ownership

LOKAKARYA 11: Bagaimana berurusan dengan perusahaan publik dan mengungkap kepemilikan saham

LOKAKARYA 12: Bagaimana cara memanfaatkan dan menganalisis data beneficial ownership

LOKAKARYA 13: Bagaimana memastikan reliabilitas data dan penerapan sanksi yang tepat

LOKAKARYA 14: Bagaimana cara menjangkau perusahaan-perusahaan dalam menyediakan panduan pembuatan laporan beneficial ownership

LOKAKARYA 15: Bagaimana cara membuka data beneficial ownership dan menerapkan format standar pengungkapannya

PENUTUPAN PLENO: Pengakuan kepemilikan: dari komitmen menjadi aksi nyata

Hari pertama konferensi akan fokus pada penggunaan informasi tentang *beneficial ownership* untuk mencapai prioritas nasional dalam sektor ekstraktif serta meningkatkan tata kelola sumber daya alam.

08.00-09.15 PEMBUKAAN PLENO: Upacara pembukaan oleh pemerintah Indonesia

● *Lokasi: Ballroom*

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan konferensi ini sebagai bagian dari agenda antikorupsi yang makin meluas, serta membuka peluang untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi nasional. Strategi antikorupsi pemerintah mencakup pengungkapan *beneficial ownership*. Indonesia juga berusaha mematuhi standar Satuan Tugas Aksi Finansial (FATF) dan akan dievaluasi pada tahun 2017. Acara pembukaan ini akan menyoroti tentang bagaimana transparansi *beneficial ownership* dianggap sebagai kunci penting untuk mewujudkan usaha-usaha ini, dan apa saja kemajuan yang sudah dicapai serta berbagai tantangan yang dihadapi.

Laporan dari **Bambang Brodjonegoro**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Indonesia

Komentar dari **Fredrik Reinfeldt**, Ketua Dewan EITI

Komentar dari Wakil Presiden Nigeria, **Yemi Osinbajo**

Pidato sambutan dari **Darmin Nasution**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

09.15-10.30 Bersama-sama mengatasi permasalahan kepemilikan tersembunyi – diskusi panel multi-stakeholder

● *Lokasi: Ballroom*

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol

Moderator: Jonas Moberg, Kepala Sekretariat EITI

Turut berkontribusi:

Natalia Soebagjo, Mantan Kepala Transparency International Indonesia

Zainab Shamsuna Ahmed, Menteri Federal Negara Kementerian Anggaran dan Perencanaan Nigeria

Jim Miller, Wakil Presiden - Bidang Keamanan dan Lingkungan Hidup, Freeport-McMoRan

Matthew Ray, Deputi Direktur, Kerangka Bisnis, Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri Inggris (BEIS)

10.30-11.00 Coffee break

11.00-11.30 Penghargaan Beneficial Ownership

● *Lokasi: Ballroom*

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol

Fredrik Reinfeldt, Ketua Dewan EITI

11.30-12.00 **Komitmen negara, sesi pertama**

● *Lokasi: Ballroom*

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol

Alamine Ousmane Mey, Menteri Keuangan Kamerun

Kayode Fayemi, Menteri Pembangunan Pertambangan dan Baja dan Ketua NEITI Nigeria

Ulanbek Ryskulov, Ketua Komite Negara Bidang Industri, Energi dan Subsoil Republik Kirgiztan

Ghazaal Habibyar, Deputy Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afganistan

12:00-13:30 **Makan siang**

Makan siang bagi partisipan konferensi

● *Area serambi Grand Ballroom*

13:30- 15:00 **SESI PLENO 1: Mengakhiri anonimitas perusahaan – kunci penting dalam memerangi korupsi**

● *Lokasi: Ballroom*

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol

Transparansi *beneficial ownership* merupakan inti dari usaha antikorupsi sekaligus pembangunan ekonomi dalam skala nasional maupun internasional. Sektor industri ekstraktif sangat rentan terpapar korupsi dikarenakan pendapatan yang seringkali berjumlah besar dipertaruhkan, dan risiko yang terdapat pada alokasi hak untuk eksplorasi, produksi dan penjualan sumber daya ekstraktif. Rumitnya struktur perusahaan dapat menutupi identitas dan kepentingan pemilik perusahaan, yang nantinya dapat menjadi masalah jika pemilik perusahaan merupakan orang yang memiliki kewenangan publik (*politically exposed person*). Meski demikian, melalui EITI, negara-negara kaya sumber daya mempromosikan transparansi di sektor ini dengan memberikan contoh dalam mempublikasikan data *beneficial ownership*, dan lebih dari setengahnya berkomitmen menetapkan registrasi *beneficial ownership* secara publik.

Panel akan membahas kemajuan yang berhasil dicapai dalam beneficial ownership, serta pentingnya memiliki data yang dipublikasikan secara terbuka. Forum akan mendiskusikan berbagai upaya dalam skala regional dan nasional dalam menciptakan harapan bagi standar global transparansi beneficial ownership.

Moderator: Daniel Kaufmann, Presiden dan CEO Natural Resource Governance Institute (NRGI)

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia

Laode M. Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia

Eber Betanzos Torres, Wakil Menteri Administrasi Publik Meksiko

Olena Sukmanova, Deputy Menteri Kehakiman Ukraina

15:00-15:30 **Coffee break**

● *Lokasi: Area serambi ruang pertemuan lantai 3*

15:30-17:00 LOKAKARYA PARALEL – HARI KE-1**15:30-17:00 LOKAKARYA 1: Kepemilikan tersembunyi dan arus keuangan terlarang**● *Lokasi: Ruang Opal**Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, dan Rusia*

Perusahaan-perusahaan dengan struktur kepemilikan panjang, rantai entitas hukum yang kompleks dan tersebar di berbagai yuridiksi berpotensi memfasilitasi arus keuangan terlarang dari negara-negara kaya sumber daya.

Struktur kepemilikan anonim tersebut dapat menghambat otoritas pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak atau penerapan kewajiban perpajakan, serta berkontribusi pada transaksi korup atau ilegal, yang dapat mengakibatkan negara-negara berkembang mengalami kerugian hingga 1 triliun dolar AS.

Sesi ini akan berfokus pada bagaimana laporan beneficial ownership dapat membantu meningkatkan pengumpulan pajak dan mencegah arus keuangan terlarang dari negara-negara kaya sumber daya ekstraktif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk petunjuk pelaksanaan, termasuk penetapan kebijakan menentukan harga transfer, kewajiban pajak bagi keuntungan modal, dan bagaimana cara berbagi informasi tentang beneficial ownership di berbagai yuridiksi.

*Moderator: **Kathleen Kao**, Analis Kebijakan Pajak, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)*

Turut berkontribusi:

Ken Dwijugastedi, Direktur Jenderal Pajak Indonesia

Sobirjon Vazirov, Pengembangan Administrasi Pajak dan Perbaikan Pajak, Komite Pajak Tajikistan

Sofiya Aisagaliyeva, Wakil Ketua Komite Pemantauan Keuangan Kementerian Keuangan Kazakhstan

Stanley Ford, Asisten Direktur Corporate Affairs, Badan Intelijen Keuangan Liberia

15:30-17:00 LOKAKARYA 2: Mengetahui perusahaan yang diberikan lisensi minyak, gas, dan pertambangan● *Lokasi: Ruang Diamond**Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, dan Rusia*

Untuk menghindari pemberian lisensi atau kontrak kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat dan mencegah kemungkinan konflik kepentingan dalam hal perizinan, otoritas lisensi memerlukan informasi mengenai *beneficial ownership* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesi ini berisi contoh praktis untuk menyoroti berbagai informasi yang tersedia, dan apa yang dibutuhkan otoritas lisensi untuk memeriksa struktur kepemilikan perusahaan yang mengajukan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam nasional di negaranya. Reformasi hukum dan administrasi, pengumpulan informasi kepemilikan dari permohonan lisensi, pemanfaatan sumber daya dari instansi lain, serta berbagai sumber informasi akan menjadi bahan pertimbangan.

Moderator: **Cari Votava**, Spesialis Senior Sektor Finansial dalam tim Financial Market Integrity, Bank Dunia

Turut berkontribusi:

Ulanbek Ryskulov, Ketua Komite Negara Bidang Industri, Energi dan Subsoil Republik Kirgiztan

Ghazaal Habibyar, Deputy Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan

Sahr Wonday, Direktur Jenderal Badan Mineral Nasional Republik Sierra Leone

Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas Indonesia

15:30-17:00 LOKAKARYA 3: Mencari tahu dengan siapa Anda berbisnis – memperbaiki iklim investasi lewat transparansi kepemilikan

● *Lokasi:* Ruang Ruby 1

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris dan Prancis

Struktur kepemilikan tersembunyi memungkinkan beberapa perusahaan melakukan transaksi terselubung, beroperasi dengan aturan yang tidak seimbang, atau mengakses proyek-proyek menguntungkan berkat koneksi politik pemilik perusahaan. Transparansi *beneficial ownership* dan persyaratan pelaporan yang konsisten dapat membangun kepercayaan dan stabilitas di lingkungan investasi sebuah negara dengan mengurangi risiko keuangan, serta menciptakan situasi yang setara dan seimbang bagi semua.

Sesi ini akan mengeksplorasi dampak positif pengungkapan beneficial ownership melalui pemeriksaan keputusan investasi swasta dan efek dari respon pemerintah dalam menyerukan transparansi kepemilikan.

Moderator: **Kathryn Sturman**, Pimpinan Program, Pengembangan dan Tata Kelola, Pusat untuk Tanggung Jawab Sosial dalam Pertambangan (CSRSM)

Turut berkontribusi:

Ernest Gbwaboubou, Menteri Pertambangan Kamerun

Thomas Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

Jim Miller, Wakil Presiden – Bidang Keamanan dan Lingkungan Hidup, Freeport-McMoRan

Chandra Triayu, Penasihat Hukum Statoil Indonesia

Barnaby Pace, Oil campaigner untuk Global Witness

15:30-17:00 LOKAKARYA 4: Mengidentifikasi risiko korupsi di tingkat eksekusi pengadaan (hilir) dan rantai pasokan

● *Lokasi: Ruang Emerald*

Bahasa: Bahasa Indonesia dan Inggris

Meskipun EITI cenderung fokus pada aktivitas hulu dalam industri minyak dan gas bumi, pengalaman di negara-negara EITI telah menarik perhatian akan isu risiko korupsi di wilayah-wilayah lain yang terkait dengan aktivitas industri ekstraktif, seperti alokasi layanan dan subkontrak dan penjualan saham negara pangsa pasar komoditas minyak, gas dan mineral di pasar domestik maupun internasional.

Sesi ini memaparkan contoh untuk mengidentifikasi situasi di mana korupsi yang melibatkan subkontraktor, penyedia layanan dan pedagang komoditas dapat diatasi lewat transparansi beneficial ownership.

*Moderator: **Natalia Soebagjo**, Mantan Kepala Transparency International Indonesia*

Turut berkontribusi:

Angelo Lay, Otoritas Minyak Nasional Timor-Leste

Wawan Wardiana, Direktur Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Falah Jassim Alamri, Penasihat Menteri Perminyakan Irak

Linda Tamakloe, Departemen Pemasaran, Perusahaan Minyak Nasional Ghana (GNPC)

Mele Kyari, Group General Manager, Divisi Pemasaran Minyak Mentah, Perusahaan Minyak Nasional Nigeria (NNPC)

17:00-19:00 Istirahat

19:00-21:00 Perjamuan oleh instansi pemerintah Indonesia

Konferensi hari ini akan berfokus pada penyusunan kerangka kerja dan sarana yang diperlukan untuk pengungkapan *beneficial ownership* yang komprehensif dan bermanfaat. Dalam hal ini termasuk memastikan bahwa definisi mengenai *beneficial ownership* telah sesuai, dan informasi yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan dalam format yang memungkinkan bagi para pemangku kepentingan untuk menggunakan data tersebut.

08:00-09:00 Sarapan pagi bersama (breakfast meeting):

Perlunya ambisi terhadap transparansi *beneficial ownership* dan ekstraktif: memanfaatkan kemitraan global pemerintahan terbuka (Open Government Partnership). ● Lokasi: Ruang Opal
Diskusi mengenai Indeks Tata Kelola Sumber Daya 2017 bersama Natural Resource Governance Institute (NRGI). ● Lokasi: Ruang Ruby 1

Risiko korupsi dalam izin pertambangan: berkaca dari 18 negara kaya akan sumber daya (Transparency International – Pertambangan untuk Pembangunan Berkelanjutan). ● Lokasi: Ruang Emerald

Pertemuan Koordinator Nasional EITI dengan anggota *multi-stakeholder group* (MSG) mengenai peta jalan *beneficial ownership*, diselenggarakan oleh EITI Indonesia. ● Lokasi: Ruang Diamond

09:00-10:30 LOKAKARYA PARALEL – PAGI HARI KE-2

09:00- 10:30 LOKAKARYA 5: Standar dan komitmen *beneficial ownership* yang berkembang: Satuan Tugas Aksi Finansial (FATF), Forum Global Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Uni Eropa

● Lokasi: Ruang Opal

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Rusia, dan Spanyol

Berbagai upaya regional dan global berkontribusi dalam meningkatkan pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai *beneficial ownership* di segala wilayah hukum. Termasuk di dalamnya adalah FATF, Forum Global OECD tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak, dan Pedoman Anti Pencucian Uang Uni Eropa ke-4, yang menetapkan standar umum untuk registrasi pihak penerima membentuk pusat registrasi yang terkonsolidasi.

Sesi ini akan menggarisbawahi perkembangan global yang terkait dengan transparansi beneficial ownership dan menggali peluang untuk sinergi dan kolaborasi.

Moderator: **Putri Rahayu**, Spesialis Kerja Sama Internasional Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Turut berkontribusi:

Jonas Moberg, Kepala Sekretariat EITI

Jeffrey Isima, Kepala Badan Penelitian dan Perencanaan Kelompok Aksi Antarpemerintah terhadap Pencucian Uang di Afrika Barat (GIABA)

Kathleen Kao, Analis Kebijakan Pajak, Forum Global mengenai Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak OECD

Kiagus Ahmad Badaruddin, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia

Tonusree Basu, Petugas Program Keterlibatan Masyarakat Sipil

9.00 – 10.30 LOKAKARYA 6: Struktur perusahaan yang kompleks dan pokok permasalahan yang menjadi pertimbangan dalam pengungkapan *beneficial ownership*

● Lokasi: Ruang Diamond

Bahasa: Bahasa Indonesia dan Inggris

Rantai kepemilikan yang kompleks atau struktur perusahaan dapat melahirkan tantangan dalam pengungkapan *beneficial ownership* dalam sektor ekstraktif. Perbedaan mekanisme kepemilikan di berbagai negara juga dapat membuat indentifikasi pemilik atau bahkan menetapkan standard definisi *beneficial ownership* yang efektif dan mendalam menjadi sulit.

Sesi ini akan mempelajari lebih lanjut tentang berbagai jenis pemegang saham/anggota, struktur kompleks dan badan hukum serta berbagai jenis kepercayaan yang relevan untuk tujuan transparansi sebagai pertimbangan dalam menetapkan beneficial ownership.

Moderator: **Sekretariat Internasional EITI**

Sesi video dan tanya-jawab:

Andres Knobel, Konsultan Jaringan Keadilan Pajak (TJN) (konferensi video)

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Pusat Analisis Perpajakan Indonesia (CITA)

Maria Tambunan, Tax Centre Universitas Indonesia

9.00 – 10.30 LOKAKARYA 7: Bagaimana mendefinisikan pihak-pihak yang memiliki kewenangan publik (*politically exposed person*) serta keterkaitannya dengan deklarasi aset

● Lokasi: Ruang Ruby 1

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Rusia

EITI mengharuskan seseorang yang memiliki kewenangan publik bersikap transparan dalam kepemilikan aset minyak, gas dan pertambangan. Pengungkapan tersebut bisa sangat berhubungan dengan persyaratan pengungkapan aset yang sudah ada bagi pejabat pemerintah.

Sesi ini bertujuan membandingkan mekanisme pengungkapan dalam negara-negara anggota pelaksana EITI dan mengenali peluang untuk mengarusutamakan persyaratan EITI mengenai pihak yang memiliki kewenangan publik, dengan belajar dari pengalaman negara-negara seperti Ukraina, yang baru-baru ini merilis daftar asetnya.

Moderator: **Gay Ordenes**, Direktur Regional Asia Pasifik, Sekretariat Internasional EITI

Turut berkontribusi:

Heni Nugraheni, Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Ghazaal Habibyar, Deputi Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan

Nkongo Budina Nzau, Senator Republik Demokratik Kongo

Cari Votava, Spesialis Senior Sektor Finansial dalam tim Financial Market Integrity, Bank Dunia

Tetiana Shevchuk, Ahli Hukum, Pusat Aksi Anti Korupsi Ukraina (ANTAC)

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia

09:00 – 10:30 LOKAKARYA 8: Bagaimana kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat terjalin dalam upaya meningkatkan pengungkapan *beneficial ownership*

● Lokasi: Ruang Emerald

Bahasa: Bahasa Indonesia dan Inggris

Masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam menempatkan *beneficial ownership* sebagai agenda global, dan sudah banyak negara anggota EITI di mana pemerintah dan masyarakat sipilnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pengungkapan *beneficial ownership*.

Sesi ini berusaha menunjukkan betapa pentingnya partisipasi publik dalam transparansi beneficial ownership, dan memberi contoh bahwa kerja sama antara perusahaan dan masyarakat sipil dapat mengukuhkan pengungkapan beneficial ownership.

Moderator: **Diani Sadiawati**, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan

Turut berkontribusi:

Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia

Fithia Findy, Sekretariat Open Government Partnership Indonesia

Cielo Magno, Bantay Kita Filipina dan anggota Dewan EITI

Wahyudi Thohary, Koordinator Program Transparency International Indonesia

Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan Publish What You Pay Indonesia

10:30-11:00 Coffee break

● Area serambi ruang pertemuan lantai 3

11:00-12:30 LOKAKARYA PARALEL – PAGI HARI KE-2

11.00 – 12.30 LOKAKARYA 9: Langkah-langkah membangun kerangka hukum dan peraturan untuk kepentingan transparansi *beneficial ownership*

● Lokasi: Ruang Opal

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, dan Rusia

Proyek uji coba EITI terkait *beneficial ownership* menunjukkan bahwa hampir tidak ada negara anggota EITI yang punya kerangka hukum sesuai untuk menghasilkan transparansi *beneficial ownership*. Oleh karena itu beberapa negara telah berinisiasi atau berencana untuk mempublikasikan tinjauan hukum dan amandemen guna mengimplementasikan *beneficial ownership*.

Sesi ini memungkinkan para partisipan untuk mendalami berbagai pendekatan hukum terhadap transparansi beneficial ownership dan mengidentifikasi pelaksanaan yang baik dalam hal mandat, isu kerahasiaan, penegakan hukum, dll. Partisipan dari negara-negara yang telah melakukan reformasi hukum yang relevan juga dapat mendiskusikan berbagai tantangan dalam menyelaraskan undang-undang dan peraturan sesuai ketentuan beneficial ownership.

Moderator: **Erica Westenberg**, Direktur Program Tata Pemerintahan, NRGi

Turut berkontribusi:

Yunus Hussein, Mantan Kepala PPAK Indonesia

Ruslan Baimishev, Direktur Departemen Penggunaan Lapisan Tanah Bawah/Subsoil, Kementerian Investasi dan Pembangunan Kazakhstan

Mavis Ainoa, Kepala Divisi Perumusan Legislatif Kementerian Kehakiman Ghana

Matthew Ray, Deputi Direktur, Kerangka Bisnis, Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri Inggris (BEIS)

Oleksiy Orlovsky, Direktur Inisiatif Program Praktik Demokrasi Yayasan Internasional Renaissance Ukraina (IRF) dan anggota Dewan EITI

11.00 – 12.30 LOKAKARYA 10: Bagaimana cara membuat pencatatan *beneficial ownership*

● Lokasi: Ruang Diamond

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, dan Prancis

Lebih dari 20 negara anggota EITI menargetkan pendaftaran *beneficial ownership*. Sayangnya, tak ada cara untuk mewujudkannya. Sementara beberapa negara EITI mempertimbangkan untuk mereformasi pendaftaran perusahaan untuk pengungkapan *beneficial ownership*, sebagian lain berencana untuk membuat transparansi *beneficial ownership* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses registrasi lisensi.

Sesi ini memungkinkan para partisipan untuk membandingkan berbagai pendekatan yang berbeda dalam pengungkapan beneficial ownership lewat pencatatan agar dapat mengidentifikasi mekanisme pengungkapan terbaik bagi masing-masing pihak.

Moderator: Emanuel Bria, Indonesia Country Manager National Resource Governance Institute

Turut berkontribusi:

Olena Sukmanova, Deputi Menteri Kehakiman Ukraina

Stephen Webster, Asisten Direktur Transparansi Perusahaan, Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri Inggris (BEIS)

Freddy Harris, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Tariq Ajhmed Sarfaraz, Direktur Jenderal, Pusat Pendaftaran Usaha dan Properti Intelektual (ACBR-IP) Afghanistan

11.00 – 12.30 LOKAKARYA 11: Bagaimana berurusan dengan perusahaan publik dan mengungkap kepemilikan saham

● *Lokasi: Ruang Ruby 1*

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris dan Prancis

Banyak perusahaan ekstraktif yang beroperasi di negara-negara yang kaya akan sumber daya terdaftar di pasar saham yang memiliki persyaratan pengungkapan yang berbeda-beda. Perusahaan-perusahaan ini dapat secara terus-menerus mengubah nama para penerima manfaat, sehingga menjadikannya sulit untuk menentukan siapa pengendali utama atau penerima manfaat sesungguhnya dari aktivitas perusahaan. Standard EITI mewajibkan perusahaan publik mengumumkan nama-nama penerima manfaat tersebut ke kearsipan pasar saham di mana mereka terdaftar. Sekalipun begitu, tantangan yang berkaitan dengan identifikasi dan pengungkapan pengendali utama di perusahaan publik telah diungkapkan negara-negara anggota EITI, dan para pemangku kepentingan pun telah menyatakan kesediaannya untuk lebih memahami persyaratan pengungkapan bursa saham di mana para operator terdaftar.

Sesi ini akan menggali tentang berbagai pendekatan dalam pengungkapan beneficial ownership dan pihak pemegang saham dari perusahaan publik, juga turut dibahas tentang perbedaan utama antara persyaratan pengungkapan pasar saham dan penegakannya. Hal ini akan mempertimbangkan apa saja informasi terkait struktur pemegang saham dan beneficial ownership mengenai perusahaan-perusahaan publik yang telah tersedia, serta akan ada diskusi tentang apa saja tantangan yang berkaitan dengan penetapan dan penerapan persyaratan pengungkapan kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut.

Moderator: Sekretariat Internasional EITI

Turut berkontribusi:

Tito Sulistio, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia

Jose P. Aquino, Departemen Penegakan dan Perlindungan Investor (EIPD) dan Kepala Komisi Anti Pencucian Uang Filipina

Michala Mackay, CEO dan Panitera, Komisi Regulasi dan Manajemen Perusahaan (CAC) Sierra Leone

James Ensor, Prinsipal, Keberlanjutan & Kebijakan Publik BHP Billiton Foundation

Barnaby Pace, Oil campaigner untuk Global Witness

David Brown, Konsultan OpenOil

11.00 – 12.30 LOKAKARYA 12: Bagaimana cara memanfaatkan dan menganalisis data *beneficial ownership*

● Lokasi: Ruang Emerald

Bahasa: Bahasa Indonesia dan Inggris

Negara-negara anggota EITI telah memiliki berbagai sumber data tentang *beneficial ownership* dan akan tersedia tahun 2020. Sumber-sumber ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi tindakan penyalahgunaan yang terkait dengan kepemilikan tersembunyi.

Sesi ini akan menyoroti berbagai studi kasus tentang data beneficial ownership dan mempelajari bagaimana cara memanfaatkan data tersebut. Sesi ini juga akan memperkenalkan aplikasi pemetaan jaringan online yang telah ada, serta berbagai alat lainnya untuk membantu menganalisis data.

Moderator: Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, anggota Komite Pengarah Open Government Partnership

Turut berkontribusi:

Wahyu Dhyatmika, wartawan investigasi, Redaktur Pelaksana Tempo Media Group

Chesna F Anwar, Direktur Kepatuhan Standard Chartered Indonesia (tbc)

Stanley Ford, Asisten Direktur Corporate Affairs Badan Intelijen Keuangan Liberia

Tetiana Shevchuk, Ahli Hukum, Pusat Aksi Anti Korupsi Ukraina (ANTAC)

12:30-13:30 Makan siang

13:30-15:00 LOKAKARYA PARALEL – SIANG HARI KE-2

13:30-15:00 Lokakarya 13: Bagaimana memastikan reliabilitas data dan penerapan sanksi yang tepat

● Lokasi: Ruang Opal

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, dan Rusia

Salah satu hal yang paling menantang dari transparansi *beneficial ownership* adalah memastikan verifikasi data memenuhi syarat, juga sanksi yang efisien bagi yang tidak melaporkan dan/atau laporan yang tidak akurat. Berbagai pendekatan berbeda bermunculan, dan di beberapa negara seperti Inggris dan Ukraina, mulai mengevaluasi reliabilitas data dan keefektifan sanksi-sanksi sangatlah mungkin.

Sesi ini akan mendiskusikan keefektifan berbagai pendekatan terhadap verifikasi data dan sanksi-sanksi di beberapa negara anggota EITI.

Moderator: Jeffrey Isima, Kepala Badan Penelitian dan Perencanaan Kelompok Aksi Antarpemerintah terhadap Pencucian Uang di Afrika Barat (GIABA)

Turut berkontribusi:

Ulanbek Ryskulov, Ketua Komite Negara Bidang Industri, Energi dan Subsoil Republik Kirgiztan

Stephen Webster, Asisten Direktur Transparansi Perusahaan, Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri Inggris (BEIS)

Oleksiy Orlovsky, Direktur Inisiatif Program Praktik Demokrasi Yayasan Internasional Renaissance (IRF) Ukraina dan anggota Dewan EITI

Mukhlis Ishak, Manajer Pajak PT Freeport Indonesia

13.30 – 15.00 LOKAKARYA 14: Bagaimana cara menjangkau perusahaan-perusahaan dalam menyediakan panduan pembuatan laporan *beneficial ownership*

● Lokasi: Ruang Diamond

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, dan Rusia

Pengalaman dengan uji coba *beneficial ownership* EITI menunjukkan bahwa kurangnya pengarahan pada perusahaan tentang bagaimana menentukan dan mengidentifikasi pihak penerima manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*), masih menjadi permasalahan yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam persyaratan pengungkapan.

Lewat sesi ini para partisipan dapat berbagi pengetahuan, berbagai tantangan dan contoh pengaplikasian yang baik dari sudut pandang jangkauan, serta meningkatkan kesadaran dan menyediakan panduan kepada perusahaan untuk memastikan efektivitas transparansi beneficial ownership.

Moderator: **Matthew Ray**, Deputy Direktur, Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri Inggris (BEIS)

Turut berkontribusi:

James Ensor, Prinsipal, Keberlanjutan & Kebijakan Publik Yayasan BHP Billiton

Syahrir AB, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia

Paulin Mawaya, Kepala Departemen untuk Hak dan Hak Kepemilikan Kadaster Pertambangan Republik Demokratik Kongo

Karim Lourimi, Sektor Publik Moore Stephens

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

13.30 – 15.00 LOKAKARYA 15: Bagaimana cara membuka data *beneficial ownership* dan menerapkan format standar pengungkapannya

● Lokasi: Ruang Ruby 1

Bahasa: Bahasa Indonesia dan Inggris

Informasi *beneficial ownership* seharusnya dapat bermanfaat dan mudah diakses oleh para *stakeholder* baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Untuk mengakomodasi tingkat fleksibilitas terhadap berbagai kebutuhan pengguna, informasi harus dapat diakses dalam format terbuka sehingga dapat dianalisis dan dikombinasikan dengan kumpulan data lainnya. Hal ini menyiratkan perlunya interoperabilitas dengan basis data eksternal *beneficial ownership* dan registrasi rantai kepemilikan untuk saling terhubung.

Sesi ini akan mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengungkap informasi beneficial ownership dalam format data yang terbuka, termasuk penerapan standar data beneficial ownership. Hal ini akan memperlihatkan potensi untuk analisis dan visualisasi data beneficial ownership, dan memungkinkan para partisipan untuk mengorelasi kumpulan data yang berbeda.

Moderator: **Jack Lord**, Pimpinan *Beneficial Ownership* Open Data Services Co-Operative

Turut berkontribusi:

Yanuar Nugroho, Deputy II Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, anggota Komite Pengarah Open Government Partnership

Baartsojt Baldorj, Kepala Otoritas Sumber Daya Mineral dan Perminyakan Mongolia

Abdoul Malick Tapsoba, Ketua Inisiatif Open Data Burkina Faso (BODI)

Antya Widita, Yayasan World Wide Web Indonesia

15:00-15:30 Coffee break

- Area serambi Grand Ballroom, lantai 1

15:30-16:30 PENUTUPAN PLENO

Pengakuan kepemilikan: dari komitmen menjadi aksi nyata

Komitmen pemerintah mengenai transparansi *beneficial ownership*

- Lokasi: Ballroom

Bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol

Moderator: **Jonas Moberg**, Kepala Sekretariat Internasional EITI

Deklarasi komitmen pemerintah, termasuk oleh:

Leopold Mboli Fatran, Menteri Pertambangan, Energi dan Hidrokarbon Republik Afrika Tengah

Fernando Castillo Torres, Direktur Jenderal Pengelolaan Sosial Kementerian Energi dan Pertambangan Peru

Julio Salvador Contreras, Wakil Menteri Pertambangan Guatemala

Olena Sukmanova, Deputy Menteri Kehakiman Ukraina

Tewodros Gebregziabher Reda, Menteri Negara Pertambangan Etiopia

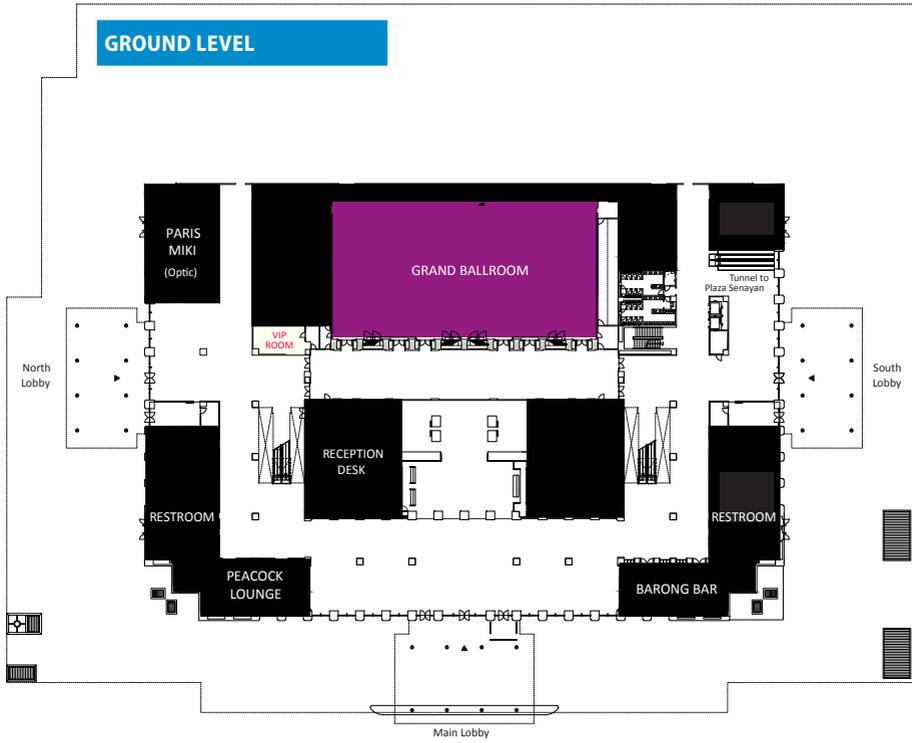
Vardan Gevorgyan, Deputy Menteri Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam Armenia

Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia

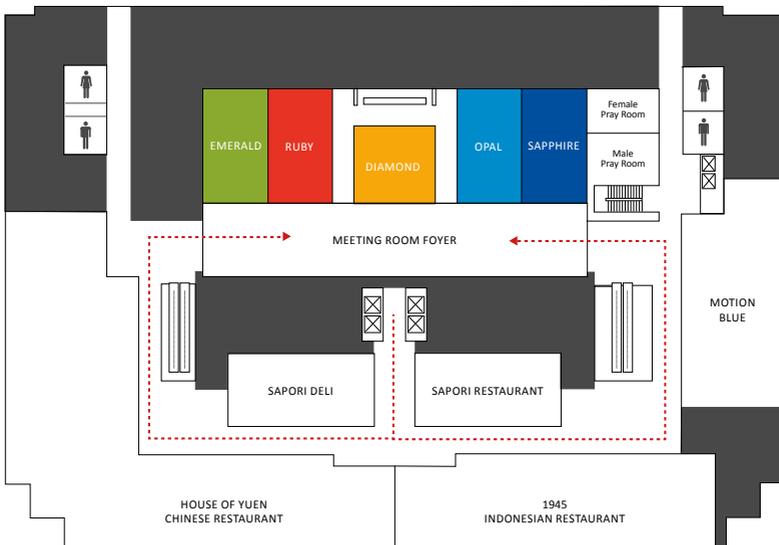
Kata penutup dari:

Jonas Moberg, Kepala Sekretariat Internasional EITI

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Indonesia



LEVEL 3



Beneficial Ownership dalam EITI – beberapa fakta penting

1
triliun
USD
masalah

50
peta jalan telah
dipublikasikan dengan
target pengungkapan
penuh tahun
2020

21
negara EITI
berkomitmen untuk
meregistrasikan
secara publik
data BO



EITI

